

NEGARA DAN KEADILAN

Volume 5 Nomor 9 / Agustus 2016

NEGARA DAN KEADILAN

EKSISTENSI HUKUMAN MATI

Oleh: Dwi Ari Kurniawati

MONEY LAUNDERING DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN KRIMINOLOGI

Oleh: Sujarwo

DERADIKALISASI BERMADZHAB SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HAK BERAGAMA

Oleh: Abdul Wahid

ABORSI SEBAGAI HAK KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN

Oleh: Dony Suryahadi Kusuma

KRIMINOLOGI DAN FENOMENA KEJAHATAN

Oleh: Sunardi

UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN SAPI

Oleh: Kholida Zia El HF

HAK MENGUASAI TANAH OLEH NEGARA SEBAGAI PRINSIP DASAR PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH DI INDONESIA

Oleh: Moh. Muhibbin

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN

Oleh: Kadek Aditya Yasa Putra

DAYA PEMBATAS ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM HUKUM PERJANJIAN

Oleh: Abdul Rokhim

KEDUDUKAN ANAK DI LUAR PERKAWINAN YANG SAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Oleh : Arif Zain Gani



Diterbitkan oleh
Program Magister Ilmu Hukum
Pascasarjana Universitas Islam Malang

Jurnal Program Magister Ilmu Hukum
NEGARA DAN KEADILAN

SUSUNAN REDAKSI

Penanggung Jawab
Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Malang

Ketua Dewan Penyunting
Dr. H. Moh Muhibbin, S.H., M.Hum.

Wakil Dewan Penyunting
Dr. H. Abdul Wahid, S.H., MAg.

Sekretaris Penyunting
Dr. Sunardi, S.H., M.H.

Dewan Penyunting
Dr. H. Moh Muhibbin, S.H., M.Hum.
Dr. H. Abdul Rokhim, S.H., M.H.
H. Maryadi Faqih, S.H., M.H.
Suratman, S.H., M.Hum.

Mitra Bestari
Prof. Dr. H. Bambang Satriya, S.H., M.H.

Tata Usaha/Kesekretariatan
Dwi Ari Kurniawati, S.H., M.H.
Moh. Faisol, S.H., M.H.
Imam Santoso

Alamat Redaksi :
Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum
Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono 193 Malang Telp. 0341 565544 e-mail: negaradankeadilan@gmail.com

Diterbitkan oleh
Program Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana Universitas Islam Malang

Jurnal Ilmiah bernama Negara dan Keadilan ini merupakan jurnal yang menyajikan tulisan, ide-ide, atau gagasan mutakhir mengenai problem hukum yang berelasi dengan masalah kenegaraan dan keadilan. Dalam jurnal ini diutamakan pada deskripsi dan diskursus hasil-hasil penelitian, baik oleh kalangan mahasiswa Program Pascasarjana, peneliti, maupun pakar di bidang ilmu hukum. Spesifikasi ini tidak lepas dari makin banyaknya kajian dan penelitian masalah hukum atau *legal case* yang dilakukan oleh peneliti dan pakar. Kondisi bangsa yang terus menerus diuji oleh problem hukum membutuhkan ide-ide cerdas dari pakar dan ahli guna memberikan jalan terang atau pencerahan.

Jurnal Program Magister Ilmu Hukum
NEGARA DAN KEADILAN

PENGANTAR REDAKSI

Setiap orang mempunyai hak. Hak disebut sebagai sesuatu yang melekat dalam diri manusia. Tanpa hak, manusia bisa kehilangan kebermaknaannya dalam menjalani kehidupan sebagai individu, berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara, sehingga logis jika seseorang itu dikaitkan dengan hak, seseorang ini menjadi sensitif dan reaksioner.

Tidak sedikit tuntutan di tengah masyarakat ini yang direlasikan dengan hak. Tidak sedikit perlawanan ditunjukkan oleh seseorang atau sekelompok orang, baik dalam ranah privat maupun publik yang dikaitkan dengan pelanggaran hak. Hak diposisikan sebagai alasan, tujuan, kepentingan, dan kebutuhan, yang membuat seseorang atau sekelompok orang masih bisa menunjukkan eksistensinya di muka bumi. Dengan penegakan hak, makna hidup bermartabat dan berkeadaban dalam bernegara bisa diwujudkan.

Jurnal **Negara dan Keadilan** kali ini hadir untuk mengapresiasi berbagai ide cerdas yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia, baik hak untuk anak, isteri, suami, maupun lainnya, yang kesemuanya ini berkaitan dengan tegaknya peraturan perundang-undangan atau jati diri Indonesia sebagai negara hukum.

Kalau bukan kita yang menjaga marwah negara hukum, lantas siapa lagi yang akan menjaganya.

**Selamat membaca
Redaksi**

DAFTAR ISI

1. EKSISTENSI HUKUMAN MATI	
<i>Oleh: Dwi Ari Kurniawati</i>	1
2. MONEY LAUNDERING DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN KRIMINOLOGI	
<i>Oleh: Sujarwo.....</i>	10
3. DERADIKALISASI BERMADZHAB SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HAK BERAGAMA	
<i>Oleh: Abdul Wahid</i>	16
4. ABORSI SEBAGAI HAK KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN	
<i>Oleh: Dony Suryahadi Kusuma</i>	24
5. KRIMINOLOGI DAN FENOMENA KEJAHATAN	
<i>Oleh: Sunardi.....</i>	33
6. UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN SAPI	
<i>Oleh: Kholidha Zia El HF.....</i>	48
7. HAK MENGUASAI TANAH OLEH NEGARA SEBAGAI PRINSIP DASAR PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH DI INDONESIA	
<i>Oleh: Moh. Muhibbin.....</i>	55
8. ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN	
<i>Oleh: Kadek Aditya Yasa Putra</i>	70
9. DAYA PEMBATAS ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM HUKUM PERJANJIAN	
<i>Oleh: Abdul Rokhim.....</i>	77
10. KEDUDUKAN ANAK DI LUAR PERKAWINAN YANG SAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM	
<i>Oleh :Arif Zain Gani.....</i>	92
11. PELAKSANAAN PUTUSAN PERCERAIAN ATAS NAFKAH ISTRI DAN ANAK	
<i>Oleh: Nur Cahyaningsih</i>	100

12. URGENSI LEGISLATIVE PREVIEW DALAM MENCEGAH HYPER REGULATION <i>Oleh: Ahmad Siboy</i>	104
13. PEMBUKTIAN ANAK LUAR KAWIN DENGAN ORANG TUA BIOLOGIS PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI <i>Oleh: Khomsiyah.....</i>	114
14. PELAKSANAAN EKSEKUSI PEMBAGIAN HARTA GONO-GINI DALAM PERKAWINAN <i>Oleh: Yunita Eka Widyasari.....</i>	121
15. KEWENANGAN ABSOLUT PERADILAN AGAMA DALAM PROSES PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH <i>Oleh: Agus Abdillah Ali.....</i>	126
16. PELAKSANAAN MEKANISME PEMBENTUKAN TATA TERTIB DEWAN <i>Oleh: Candra Purnama.....</i>	133
17. ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI ATAS PEMBERIAN HAK WASIAT WAJIBAH KEPADA AHLI WARIS NON MUSLIM <i>Oleh: Abdul Kholik.....</i>	139
18. PENGANGKATAN ANAK (ATTABANY) DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM <i>Oleh: Eri Handini.....</i>	147
19. TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KABUPATEN PASURUAN <i>Oleh: Aswin Arief.....</i>	154
20. KEBEbasan HAKIM KONSTITUSI DALAM MELAKUKAN PENAFSIRAN HUKUM <i>Oleh Anang Sulistyono.....</i>	161

HAK MENGUASAI TANAH OLEH NEGARA SEBAGAI PRINSIP DASAR PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH DI INDONESIA

Oleh: Moh. Muhibbin

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Pascasarjana Universitas Islam Malang

Abstract

Right to Control by the State on land as a source of state authority to provide the setting control, ownership, allocation and use of land in Indonesia is limited by the 1945 Constitution that matters regulated by the state must not result in violations of human rights guaranteed by the 1945 Constitution. Regulations could lead to a loss of interest and on the other hand is one of the violations. Someone who took off his rights should receive legal protection and fair appreciation for the sacrifices that. In addition to the 1945 Constitution, there are also substantive restrictions within the meaning of the regulations made by the state should be relevant to the objectives to be achieved is for the greater prosperity of the people. The authority of the State making the arrangements relating to this authority can not be delegated to the private sector because it involves public welfare which is loaded with service mission. Delegation to private companies that are part of the community will lead to a conflict of interest, and are therefore not possible.

Keywords: right to control by the state, the land tenure and property.

PENDAHULUAN

Penempatan Bangsa Indonesia sebagai penerima karunia Tuhan Yang Maha Esa atas bumi Indonesia mengandung makna bahwa bumi Indonesia merupakan kepunyaan bersama seluruh komponen masyarakat Indonesia, sehingga setiap warga negara dijadikan sebagai subjek yang mempunyai hak dan tanggung jawab sama dalam pemeliharaan, penggunaan dan peruntukan bumi Indonesia dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Bagi masyarakat Indonesia, hubungan manusia dan tanah mempunyai sifat kodrati. Dalam hal ini tidak dapat dihilangkan oleh siapapun, kecuali jika tanahnya terkena bencana, tanah yang dimiliki tidak dapat ditempati, dikelola, dimanfaatkan, digunakan, dipakai ataupun diperjualbelikan. Begitu pentingnya tanah sebagai kebutuhan dasar manusia, sehingga negara